

# ANALISIS PERAN PAJAK DAN SUBSIDI DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Dwi Sintia Rahmawanti<sup>1</sup>, Imahda Khoiri Furqon<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan<sup>1\*</sup>

Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan<sup>2</sup>

---

## ARTICLE INFO



### Authors Email :

[dwi.sintia.rahmawanti@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:dwi.sintia.rahmawanti@mhs.uingusdur.ac.id)

[imahda.khoiri.furqon@uingusdur.ac.id](mailto:imahda.khoiri.furqon@uingusdur.ac.id)

### Keywords:

Economic

Subsidy

Tax

## ABSTRACT

*This study aims to explore the extent to which taxes and subsidies play a role in supporting sustainable economic growth in Indonesia using a literature review method. The study was conducted by collecting and studying various secondary sources such as journals, books, and policy reports that describe the role of taxes as a source of state revenue, a tool for income redistribution, and a means of environmental regulation. Subsidies are studied as a fiscal tool that can provide protection to low-income communities and also encourage the development of environmentally friendly energy and sustainable technology. The findings of the study indicate that an effective combination of tax and subsidy policies is crucial to achieving sustainable development goals, especially in terms of poverty alleviation, improving social welfare, and protecting the environment. However, the successful implementation of this policy requires transparency, fairness, and optimal management in order to encourage inclusive and sustainable economic growth. This study provides significant contributions to policy makers in designing fiscal strategies that support sustainable national development.*

## PENDAHULUAN

Pembangunan suatu negara akan maju dan berjalan lancar jika berbagai sumber daya dikelola dengan efisien, sehingga pendapatan nasional meningkat dan dapat digunakan untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pembangunan. Pendapatan nasional bisa berasal dari investasi, pajak, ekspor, impor, tingkat produksi masyarakat, tingkat konsumsi masyarakat, dan lainnya. Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara untuk mencapai pertumbuhan pembangunan yang diinginkan. Menurut Adriani dalam Adrian Sutedi (2011), pajak diartikan sebagai kontribusi dari masyarakat kepada negara yang bersifat wajib dan ditetapkan oleh undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dalam rangka melaksanakan tugas negara dalam pemerintahan. Pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kewajiban yang harus dibayar kepada negara oleh individu atau badan hukum yang bersifat memaksa sesuai undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara demi kesejahteraan rakyat. Berdasarkan penjelasan mengenai pajak di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi yang ditetapkan oleh Undang-Undang serta peraturan yang mendukungnya, dan sifat dari kontribusi ini dapat dipaksa (pelanggaran terhadap kewajiban pajak dapat memperoleh sanksi). Pajak diambil oleh Negara, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, dan dipergunakan untuk biaya-biaya pemerintah. Pajak memiliki fungsi yang sangat krusial dalam kehidupan bernegara, terutama dalam konteks pembangunan, karena pajak adalah sumber dana bagi Negara untuk menanggung berbagai pengeluaran, termasuk kegiatan pembangunan yang meliputi fungsi anggaran, pengaturan, stabilitas, dan penerimaan kembali. Pembayaran pajak merupakan manifestasi dari tanggung jawab sebagai warga Negara serta partisipasi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban fiskal untuk mendanai Negara dan pembangunan nasional. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan, kewajiban membayar pajak bukan hanya hak dan tanggung jawab, tetapi juga kesempatan bagi setiap warga Negara untuk berkontribusi dalam mendanai Negara dan pembangunan nasional (Rukmini, 2016).

Kesejahteraan sosial adalah salah satu fondasi utama dalam pencapaian pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Di Indonesia, pemerintah bertekad untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat berbagai inisiatif dan kebijakan yang bertujuan untuk menekan angka kemiskinan serta meningkatkan kualitas hidup. Salah satu alat yang dipergunakan untuk mencapai tujuan ini adalah program subsidi. Subsidi dari pemerintah merupakan bantuan keuangan yang diberikan kepada masyarakat untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, kesehatan, pendidikan, dan energi. Dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan perubahan sosial yang cepat, kebutuhan akan program subsidi yang efisien semakin mendesak. Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan beragam, menghadapi masalah ketimpangan sosial serta ekonomi yang signifikan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam penurunan kemiskinan, masih ada kelompok masyarakat yang rentan dan sulit mengakses layanan dasar secara memadai. Maka dari itu, program subsidi diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi kesenjangan ini. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program subsidi. Beberapa program yang paling terkenal meliputi Program Beras Sejahtera (Rastra),

Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta Program Indonesia Pintar (PIP). Masing-masing program ini dirancang dengan tujuan yang spesifik dan menysasar kelompok masyarakat tertentu, seperti keluarga berpenghasilan rendah, anak-anak, dan lansia. Sebagai contoh, PKH memberikan bantuan tunai langsung kepada keluarga yang memenuhi syarat, dengan harapan dana tersebut digunakan untuk keperluan pendidikan dan kesehatan anak-anak. Namun, efektivitas dari program subsidi ini sering kali menjadi topik perdebatan. Meskipun sejumlah penelitian menunjukkan bahwa program subsidi dapat memperluas akses terhadap kebutuhan dasar, tantangan dalam pelaksanaannya juga tidak dapat diabaikan. Beberapa masalah yang sering timbul termasuk rumitnya birokrasi, kurangnya transparansi, dan potensi penyalahgunaan dalam penyaluran bantuan. Hal ini dapat menyebabkan subsidi tidak sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, sehingga tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak tercapai secara maksimal. Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan program subsidi adalah pentingnya pendataan yang tepat. Banyak program subsidi mengandalkan data dari Badan Pusat Statistik dan instansi sosial setempat untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan. Namun, sering kali data ini tidak terbaru atau tidak mencakup seluruh masyarakat yang seharusnya, sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi bantuan. Kelemahan dalam sistem pendataan juga dapat menyebabkan korupsi dan penyalahgunaan wewenang, di mana individu atau kelompok tertentu memperoleh akses yang tidak semestinya terhadap bantuan. Dalam hal ini, sangat penting untuk melakukan evaluasi secara rutin terhadap program subsidi yang ada. Evaluasi ini tidak hanya mencakup analisis dampak dari program tersebut, tetapi juga perlu mempertimbangkan aspek-aspek pelaksanaan, seperti efisiensi distribusi, kepuasan penerima bantuan, dan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang (Ekonomi, n.d.).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif, di mana data yang diperoleh berasal dari pengumpulan, seleksi, dan analisis berbagai sumber sekunder seperti artikel ilmiah, buku, dan laporan kebijakan yang relevan mengenai peranan pajak dan subsidi dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena memberikan kesempatan untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh tanpa perlu mengumpulkan data primer, sehingga mampu mengidentifikasi potensi dan hambatan dalam pelaksanaan pajak dan subsidi yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Peran Pajak Dalam Pembangunan Berkelanjutan**

#### **a. Teori-Teori Ekonomi yang Relevan**

Teori Alokasi Sumber Daya, Peran pajak sangat signifikan dalam menentukan bagaimana sumber daya didistribusikan dalam ekonomi. Pajak bisa mempengaruhi pilihan yang diambil untuk investasi, produksi, dan konsumsi dengan mendorong atau

menghalangi aktivitas ekonomi tertentu. Contohnya, tarif pajak yang tinggi pada barang-barang mewah dapat menurunkan konsumsi barang-barang tersebut dan mendorong masyarakat untuk mengalihkan pengeluarannya ke sektor lain. Di sisi lain, insentif pajak untuk sektor tertentu seperti teknologi ramah lingkungan dapat merangsang investasi dan inovasi di bidang tersebut, membantu transisi ke ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Teori Efisiensi, Penerapan pajak bisa berdampak pada efisiensi ekonomi dengan menciptakan ketidaksesuaian dalam pasar dan perilaku ekonomi. Pajak yang tidak mengenai sasaran dapat menyebabkan pembagian sumber daya yang kurang efektif, yang berakibat menurunnya efisiensi pasar. Contohnya, pajak yang tinggi terhadap tenaga kerja bisa mengurangi motivasi untuk bekerja dan berinovasi, sedangkan pajak yang rendah pada modal bisa meningkatkan penumpukan kekayaan pada sejumlah kecil orang atau perusahaan. Oleh karena itu, perancangan kebijakan pajak perlu memperhatikan konsekuensinya terhadap efisiensi ekonomi secara keseluruhan, dengan tujuan untuk meminimalkan ketidaksesuaian dan memaksimalkan kesejahteraan masyarakat.

Teori Keadilan, Pajak memainkan peranan penting dalam mencapai keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan di dalam masyarakat. Pajak progresif, di mana tarif pajaknya naik seiring dengan kenaikan pendapatan, dapat berkontribusi dalam mengurangi ketidakseimbangan ekonomi dengan mengalihkan sebagian kekayaan dari individu yang berpenghasilan tinggi kepada mereka yang berpenghasilan rendah. Selain itu, kebijakan perpajakan dapat dimanfaatkan untuk mendukung program-program sosial yang bermanfaat untuk masyarakat secara umum, seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, sistem pajak dapat menjadi sarana yang efektif untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

b. Implikasi Ekonomi Penerapan Pajak di Indonesia

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat esensial dan krusial untuk mendukung berbagai program pemerintah di Indonesia. Dana yang diperoleh dari pajak digunakan untuk mendanai pembangunan fasilitas umum, seperti jalan raya, jembatan, dan pelabuhan, yang sangat penting untuk memperbaiki konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pajak juga berfungsi untuk mendukung sektor pendidikan dan kesehatan yang menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia. Dengan penerimaan pajak yang cukup, pemerintah dapat melaksanakan berbagai program sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Berikut adalah beberapa pengaruh dari penerimaan pajak:

1. Pengaruh terhadap Perekonomian, Pajak memiliki kemampuan untuk memengaruhi perekonomian dalam berbagai cara. Di satu sisi, pajak yang tinggi dapat menurunkan pendapatan yang dapat dibelanjakan oleh masyarakat dan mengurangi tingkat konsumsi, sehingga berpotensi mengurangi permintaan keseluruhan dan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, pajak yang rendah bisa mengurangi kemampuan pemerintah untuk melakukan investasi publik yang esensial dalam mendukung pertumbuhan jangka panjang. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk mencapai keseimbangan yang ideal dalam kebijakan perpajakan, agar dapat

mendorong investasi dan konsumsi tanpa mengurangi pendapatan yang diperlukan untuk pembangunan.

2. Dampak pada Distribusi Pendapatan dan Kekayaan, Penerapan pajak juga memiliki implikasi penting terhadap distribusi pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat. Melalui sistem perpajakan yang progresif, di mana tarif pajak meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan, pemerintah dapat membantu mengurangi ketimpangan pendapatan dan kekayaan. Pajak yang dipungut dari kelompok berpendapatan tinggi dapat digunakan untuk mendanai program-program sosial yang bermanfaat bagi kelompok berpendapatan rendah, seperti subsidi pangan, bantuan pendidikan, dan layanan Kesehatan sehingga pajak dapat berfungsi sebagai alat redistribusi yang efektif untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.
  3. Pengaruh terhadap Efisiensi Ekonomi, Pajak dapat berperan dalam mempengaruhi efisiensi ekonomi dengan menimbulkan gangguan di pasar dan perilaku ekonomi. Kebijakan pajak yang tidak dirumuskan dengan baik bisa menyebabkan pembagian sumber daya yang tidak efektif dan menurunkan efisiensi pasar. Contohnya, pajak yang tinggi pada tenaga kerja dapat menurunkan motivasi untuk bekerja dan berinovasi, sedangkan pajak yang rendah pada modal bisa mendorong pengumpulan kekayaan yang tidak produktif. Pemerintah dan masyarakat diharapkan pada saat merancang kebijakan pajak, penting untuk mempertimbangkan dampaknya bagi efisiensi ekonomi secara keseluruhan. Kebijakan pajak yang efektif seharusnya mengurangi gangguan pasar dan memfasilitasi pembagian sumber daya yang optimal demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Vientiany et al., 2024).
- c. Peran Pajak dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

Pajak memiliki peranan yang krusial dalam mendanai pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sebagai sumber utama pendanaan, pajak memberikan kontribusi yang besar terhadap anggaran untuk proyek-proyek infrastruktur, seperti pembuatan jalan, jembatan, sistem transportasi, dan penyediaan energi. Dalam beberapa tahun terakhir, penerimaan pajak terutama dari pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) telah mengalami kenaikan, membuka lebih banyak peluang bagi pemerintah untuk berinvestasi dalam infrastruktur. Dalam hal ini, peningkatan anggaran untuk pembangunan infrastruktur mencerminkan pemahaman pemerintah mengenai pentingnya infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang memadai tidak hanya meningkatkan efisiensi transportasi, tetapi juga menciptakan suasana yang ramah bagi investasi. Misalnya, proyek seperti pembuatan jalan tol dan pembangunan bandara baru menunjukkan dampak langsung terhadap perbaikan konektivitas dan akses, yang sangat penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi suatu wilayah. Kendati sumbangan pajak terhadap pembangunan infrastruktur cukup signifikan, analisis ini juga menemukan sejumlah masalah yang dihadapi dalam pengelolaan pajak untuk tujuan tersebut. Salah satu masalah utama adalah rendahnya tingkat kepatuhan resmi terhadap pajak. Banyak wajib pajak yang belum menyadari pentingnya kontribusi mereka untuk pembangunan infrastruktur, yang mengakibatkan tindakan penghindaran pajak (Bappenas, 2015).

Badan Pusat Statistik mengungkapkan bahwa minimnya pemahaman mengenai manfaat langsung dari pajak untuk masyarakat, seperti peningkatan akses terhadap layanan publik dan pembangunan infrastruktur, menjadi faktor penyebab rendahnya tingkat kepatuhan ini. Tantangan lain yang dihadapi adalah pengelolaan anggaran yang tidak efektif. Dalam beberapa situasi, dana yang seharusnya dialokasikan untuk proyek infrastruktur terhalang oleh birokrasi yang rumit dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Hal ini dapat mengakibatkan penundaan dalam pelaksanaan proyek dan pengeluaran yang tidak sesuai sasaran. Contohnya, beberapa proyek infrastruktur mengalami lonjakan biaya dan keterlambatan akibat koordinasi yang buruk antarinstansi pemerintah, sehingga dana tidak dapat dimanfaatkan sebaik mungkin.

Pemerintah dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dan promosi publik yang bertujuan untuk menjelaskan pemanfaatan pajak dalam proyek-proyek yang berpengaruh langsung pada kehidupan sehari-hari. Peningkatan pemahaman ini diharapkan mampu mendorong kepatuhan pajak dan mengurangi tindakan penghindaran pajak. Di samping itu, perlu dilakukan perubahan dalam sistem perpajakan serta pengelolaan anggaran demi memastikan distribusi yang lebih jelas dan bertanggung jawab. Tindakan seperti penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan pajak dan anggaran, serta pelaksanaan sistem laporan yang lebih terbuka, dapat mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, penguatan kapasitas institusi perpajakan dan pengelola anggaran juga sangat vital untuk meminimalkan kebocoran dana dan penyalahgunaan. Kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat harus ditingkatkan guna menciptakan solusi yang lebih kreatif dan berkelanjutan dalam pengembangan infrastruktur. Kerjasama ini bisa meliputi pembiayaan bersama, di mana sektor swasta terlibat dalam pembiayaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur. Dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, proyek infrastruktur dapat dirancang agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lebih berkelanjutan untuk jangka panjang (Yusuf, 2019).

## **2. Peran Subsidi dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan**

### **a. Jenis-jenis Program Subsidi**

1. Subsidi bantuan pangan adalah salah satu inisiatif yang paling banyak dilaksanakan di Indonesia, terutama untuk menjamin akses yang lebih baik terhadap makanan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program Beras Sejahtera (Rastra) adalah salah satu contoh bantuan pangan yang bertujuan untuk menyediakan beras dengan harga yang terjangkau bagi keluarga yang kurang mampu. Dalam program ini, pemerintah menawarkan beras dengan harga di bawah standar pasar, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok ini tanpa harus mengeluarkan uang yang besar. Namun, keefektifan program ini tidak selalu terjamin. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa walaupun banyak keluarga menerima beras bantuan, kualitas dan jumlah beras yang diberikan seringkali tidak memenuhi harapan. Selain itu, terdapat laporan tentang penyalahgunaan di mana oknum tertentu memanipulasi data penerima bantuan, sehingga beras tidak sampai kepada mereka yang sangat membutuhkan sehingga diperlukan sistem pengawasan yang

lebih baik dan tanggung jawab dalam penyaluran bantuan pangan agar tujuan dari program ini dapat tercapai.

2. Subsidi bantuan untuk Energi terdiri dari berbagai jenis dukungan, terutama dalam hal harga bahan bakar seperti LPG dan listrik. Tujuan dari program ini adalah untuk mengurangi beban finansial masyarakat dalam memenuhi kebutuhan energi sehari-hari. Bantuan energi memiliki peranan yang sangat penting, terutama bagi keluarga yang kurang mampu yang bergantung pada bahan bakar untuk memasak serta kebutuhan listrik. Walaupun subsidi energi memberikan keuntungan bagi masyarakat, dampaknya terhadap anggaran negara juga harus diperhatikan. Jumlah dana yang dialokasikan untuk subsidi energi cukup besar, dan dapat membebani keuangan pemerintah serta mengganggu program pembangunan lainnya. Di samping itu, subsidi ini dapat menyebabkan ketidak efisienan dalam penggunaan energi, karena masyarakat tidak termotivasi untuk beralih ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Dalam program subsidi ini pemerintah perlu memikirkan strategi jangka panjang untuk memperbaiki sistem subsidi energi, termasuk mengambil langkah-langkah untuk mendorong pemanfaatan energi terbarukan.
3. Subsidi Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu bentuk dukungan kesehatan yang paling penting di Indonesia. Melalui program ini, pemerintah memberikan kesempatan untuk mendapatkan layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa memandang kondisi ekonomi. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mengurangi angka kematian akibat penyakit, dan mencegah terjebaknya masyarakat dalam kemiskinan karena biaya kesehatan yang tinggi. Walaupun JKN telah memberikan banyak keuntungan, seperti peningkatan akses ke layanan kesehatan, masih ada tantangan dalam pelaksanaannya. Banyak laporan menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan mengalami kekurangan tenaga medis, obat-obatan, dan alat yang memadai, sehingga kualitas dari layanan kesehatan tidak selalu sesuai harapan. Selain itu, sistem klaim yang rumit sering kali menyulitkan rumah sakit dalam menerima pembayaran, yang dapat mengganggu kelangsungan pelayanan. Evaluasi dan perbaikan pada sistem JKN sangat penting untuk menjamin layanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat.
4. Subsidi Pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu jenis dukungan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan akses bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Program ini memberikan bantuan finansial untuk mendukung biaya pendidikan, seperti untuk membeli buku dan biaya transportasi. PIP berupaya memastikan anak-anak dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi dapat mendapatkan pendidikan yang memadai. Meskipun banyak anak yang mendapatkan manfaat dari program ini, ada berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Salah satu masalah utama adalah minimnya informasi mengenai program ini di kalangan masyarakat, sehingga banyak orang tua yang tidak menyadari bahwa mereka memenuhi syarat untuk menerima bantuan. Selain

itu, kadang-kadang dana bantuan tidak disalurkan dengan tepat waktu, sehingga anak-anak terpaksa meninggalkan sekolah karena kesulitan finansial (Soen et al., 2022).

b. Dampak Program Subsidi terhadap Kesejahteraan Sosial

1. Meningkatkan Akses Terhadap Kebutuhan Dasar

Salah satu keuntungan utama yang dapat dilihat dari program subsidi adalah peningkatan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan dasar. Dengan adanya subsidi di bidang makanan, energi, kesehatan, dan pendidikan, orang-orang yang sebelumnya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar kini dapat mengalami peningkatan dalam kualitas hidup mereka. Contohnya, berkat subsidi makanan, keluarga yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam mendapatkan asupan bergizi kini mampu memenuhi kebutuhan gizi mereka, yang membawa dampak baik bagi kesehatan dan produktivitas.

2. Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Program dukungan kesehatan, seperti JKN, telah menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap layanan kesehatan meningkat. Dengan adanya dukungan ini, masyarakat lebih mudah untuk memperoleh pengobatan, sehingga menurunkan jumlah kematian karena penyakit yang sebelumnya tidak ditangani. Selain itu, kondisi kesehatan yang membaik juga berperan dalam peningkatan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat, yang pada akhirnya dapat mendukung perkembangan ekonomi.

3. Pendidikan yang Lebih Baik

Subsidi pendidikan mendukung anak-anak dari keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi agar dapat memperoleh pendidikan yang pantas. Inisiatif seperti PIP memberikan mereka kesempatan untuk memanfaatkan sarana pendidikan dan belajar dengan lebih efektif, yang pada akhirnya dapat memperluas peluang kerja mereka di masa depan. Pendidikan yang berkualitas merupakan investasi jangka panjang yang dapat memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga (Syafa'at, 1996).

**3. Kombinasi Pajak dan Subsidi sebagai Alat Kebijakan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi**

Kombinasi antara pajak dan subsidi memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung perkembangan ekonomi dengan cara yang saling melengkapi dan seimbang. Pajak bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dan mengatur pengeluaran serta investasi melalui penurunan daya beli masyarakat, sementara subsidi diarahkan untuk menekan biaya produksi atau harga barang dan jasa. Hal ini memungkinkan peningkatan daya beli masyarakat dan mendorong permintaan secara keseluruhan. Secara matematis, fungsi linier dari pajak dan subsidi menunjukkan bagaimana perubahan tarif pajak atau nilai subsidi dapat mempengaruhi pendapatan yang dapat digunakan oleh masyarakat, permintaan pasar, serta distribusi pendapatan. Pajak biasanya mengakibatkan peningkatan harga dan penurunan jumlah barang yang terjual, sedangkan subsidi cenderung

menurunkan harga jual dan meningkatkan keseimbangan pasar (Ramadhan & Mariyanti, 2013).

Kebijakan pajak yang bersifat progresif serta subsidi yang tepat sasaran dapat meningkatkan keadilan dalam perekonomian dan mengurangi kesenjangan, karena pajak yang dikenakan pada orang-orang berpenghasilan tinggi dapat digunakan untuk memberikan subsidi bagi kelompok yang rentan, sehingga mendorong distribusi kekayaan yang lebih adil dan menciptakan stabilitas sosial. Dalam situasi pemulihan ekonomi, subsidi untuk energi dan makanan memainkan peran penting dalam mempertahankan daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi dan krisis global, namun pemerintah perlu berhati-hati agar subsidi tidak memberikan beban berlebih pada anggaran negara yang dapat mengurangi ruang fiskal untuk pengeluaran produktif seperti infrastruktur dan pendidikan. Insentif fiskal, seperti pengurangan tarif pajak atau pelonggaran pajak bagi sektor industri dan UMKM, dapat mendorong munculnya investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional, dengan syarat bahwa insentif tersebut dievaluasi dengan cermat untuk memastikan bahwa mereka benar-benar mendorong aktivitas ekonomi yang produktif dan bukan sekadar mengurangi kewajiban pajak tanpa dampak yang signifikan. Kombinasi kebijakan pajak dan subsidi yang dibuat dengan cermat dan seimbang, memperhatikan aspek efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan fiskal, dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi makro dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Beberapa fungsi dari kombinasi pajak dan subsidi sebagai instrumen kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Mengurangi Ketimpangan, Pajak yang meningkat bagi individu dengan penghasilan tinggi dapat digunakan untuk memberikan bantuan kepada kelompok yang rentan, sehingga berkontribusi pada pengurangan ketimpangan sosial dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
- b. Insentif untuk Investasi, Subsidi dan insentif fiskal berupa pengurangan pajak dapat mendorong investasi di sektor strategis dan UMKM, yang berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing ekonomi.
- c. Tantangan Pengelolaan, Pemerintah harus memastikan subsidi tepat sasaran agar tidak membebani anggaran negara secara berlebihan dan insentif pajak benar-benar mendorong aktivitas ekonomi produktif, bukan hanya mengurangi kewajiban pajak tanpa dampak nyata.
- d. Dampak Makroekonomi, Kombinasi kebijakan pajak dan subsidi yang seimbang dapat menjaga stabilitas makroekonomi, meningkatkan daya beli masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

#### 4. Dasar Hukum UU yang Mengatur Peran Pajak dan Subsidi dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia

##### a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) merupakan fondasi utama sistem perpajakan nasional Indonesia. KUP mengatur semua hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban perpajakan antara wajib pajak dan negara, termasuk pendaftaran, pelaporan, penyetoran, pemeriksaan, serta penegakan hukum pajak. Dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Makna pasal ini menegaskan bahwa pajak memiliki fungsi sosial dan ekonomi sekaligus. Pajak tidak hanya kewajiban individu, tetapi juga bentuk partisipasi aktif warga negara dalam membiayai pembangunan nasional. UU ini juga memperkenalkan system *Self Assessment System*, yaitu sistem di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak sendiri. Hal ini mencerminkan prinsip kemandirian dan kesadaran hukum fiskal masyarakat, yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan karena mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam dan menumbuhkan kesadaran kontribusi publik terhadap keuangan negara (perwali, 2015).

##### b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh)

UU ini mengatur dasar hukum pemungutan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi maupun badan, baik dari dalam maupun luar negeri. Prinsip utama dalam UU ini adalah keadilan sosial dan pemerataan pendapatan, karena tarif pajak ditetapkan progresif artinya, semakin tinggi penghasilan seseorang, semakin tinggi pula tarif pajak yang dikenakan. Selain itu, UU ini juga memberikan insentif pajak bagi kegiatan ekonomi produktif seperti investasi, UMKM, serta kegiatan yang mendukung ekonomi hijau dan inovatif. Dengan demikian, kebijakan pajak tidak hanya bersifat fiskal, tetapi juga menjadi alat stimulus ekonomi dan sosial. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, PPh berfungsi untuk:

1. Mengurangi kesenjangan sosial, dengan mengambil kontribusi lebih besar dari pihak berpenghasilan tinggi untuk membiayai program sosial.
2. Mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif, melalui pemberian keringanan pajak bagi sektor usaha kecil, industri hijau, dan investasi berkelanjutan (perbub, 2016).

##### c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang: Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM

Undang-undang ini mengatur pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri serta atas impor dari luar negeri. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bersifat tidak langsung, artinya ditanggung oleh konsumen akhir melalui harga barang atau jasa. Sementara Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) diterapkan untuk barang-barang mewah guna mencegah konsumsi berlebihan dan meningkatkan

keadilan sosial. Peranan pajak ini dalam pembangunan berkelanjutan sangat besar karena:

1. Memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara, yang digunakan untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
  2. Menjadi alat pengatur pola konsumsi masyarakat misalnya, PPN lebih rendah bisa diberikan untuk produk ramah lingkungan (perbub, 2013).
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD)

UU HKPD bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan negara yang adil, efektif, dan berkelanjutan antara pusat dan daerah. Undang-undang ini menggantikan UU No. 33 Tahun 2004 dan mengatur pembagian pajak, retribusi, serta transfer fiskal untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, UU ini berfungsi untuk:

1. Mendorong pemerataan ekonomi antarwilayah, sehingga hasil pajak digunakan untuk pembangunan daerah tertinggal.
2. Menetapkan mekanisme transfer berbasis kinerja, yang memberikan insentif kepada daerah yang efisien dan transparan dalam mengelola keuangannya.
3. Menjamin partisipasi daerah dalam pembiayaan publik dan pembangunan infrastruktur lokal.

## **SIMPULAN**

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang sangat krusial untuk mendukung berbagai program pemerintah di Indonesia. Hasil dari pajak digunakan untuk mendanai pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan yang diperlukan untuk meningkatkan keterhubungan dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pajak berfungsi untuk mendanai sektor pendidikan dan kesehatan yang merupakan investasi jangka panjang guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Subsidi dinilai sebagai alat fiskal yang dapat membantu melindungi masyarakat yang kurang mampu sekaligus mendorong perkembangan energi terbarukan dan teknologi yang ramah lingkungan. Kombinasi antara pajak dan subsidi memiliki peran strategis yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara yang saling melengkapi dan seimbang. Pajak bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara sekaligus mengatur konsumsi dan investasi melalui penurunan daya beli masyarakat, sedangkan subsidi bertujuan untuk menurunkan biaya produksi atau harga barang dan jasa sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong permintaan keseluruhan. Secara matematis, model linier pajak dan subsidi menunjukkan bagaimana perubahan tarif pajak atau besaran subsidi dapat mempengaruhi pendapatan yang dapat dibelanjakan oleh masyarakat, permintaan pasar, dan distribusi pendapatan, di mana pajak biasanya meningkatkan harga dan mengurangi jumlah barang yang terjual, sementara subsidi menurunkan harga jual dan meningkatkan keseimbangan pasar, sehingga keduanya secara signifikan mempengaruhi penempatan sumber daya dan efisiensi pasar.

## REFERENSI

- Bappenas. (2015). Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. *Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2015-2019*.
- Ekonomi, F. (n.d.). *Efektivitas Program Subsidi Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Jonni Harianto Damanik*. 1-10.
- Rukmini, S. B. (2016). Peranan Pajak Dalam Meningkatkan Pembangunan di Kabupaten Trenggalek. *Dewantara, 2(2)*, 204-219.
- Syafa'at, N. (1996). Analisis dampak subsidi harga output terhadap kesejahteraan masyarakat. *Economics and Finance in Indonesia, XLIV (3)*, 251-271. <https://www.lpem.org/repec/lpe/e/fijnl/199613.pdf>
- Vientiany, D., Islam, U., Sumatera, N., Shafa, U., Kania, S., Siti, U., & Ritonga, Z. (2024). *Dimensi Ekonomi Dalam Implikasi Perpajakan Di Indonesia*. 2(7), 199-211 <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i7.1867>
- Yusuf, A. (2019). Peran Pajak dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, 17(2)*, 45-56.
- Perbub. (2013). *Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman No. 80 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38773/uu-no-42-tahun-2009>
- Perbub. (2016). *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39618/uu-no-36-tahun-2008>
- Perwali. (2015). *PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 58 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39697/uu-no-28-tahun-2007>
- Ramadhan, H., & Mariyanti, T. (2013). Pengaruh Pajak, Subsidi Dan Zis Terhadap Penurunan Kemiskinan Di Indonesia. *Media Ekonomi, 22(2)*, 123-132. <https://doi.org/10.25105/me.v22i2.3170>
- Soen, A. S., Sugianto, H., Theodorus, R., & Mapusari, S. A. (2022). Subsidi di Indonesia. *WACANA EKONOMI (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi), 21(1)*, 84-92. <https://doi.org/10.22225/we.21.1.2022.84-92>